

**TESIS**

**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR)  
SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN  
(KUPEDES) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
UNIT UKUI KABUPATEN PELALAWAN**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) SEBAGAI  
AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDDES)  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT UKUI  
KABUPATEN PELALAWAN**

(Dicky Kurniawan, NIM. 1820123050, Program Studi Magister Kenotariatan, Program  
Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 95 Halaman, 2022)

**ABSTRAK**

Pada umumnya, yang menjadi Agunan yang digunakan dalam suatu kegiatan pemberian kredit adalah barang bergerak seperti mobil atau benda tidak bergerak seperti tanah yang mana masing-masingnya dibuktikan dengan Sertifikat Hal Milik untuk tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun, dalam prakteknya BRI juga menerima Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dalam proses pemberian kredit kupedes. Dimana SKGR tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat. kedudukan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas hasil peralihan hak dengan jual beli antar warga apabila dijaminan ke Bank tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan jika belum disertipikatkan. Namun ada beberapa bank yang masih menerima debitur dengan tanah Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai jaminan pemberian kredit. Salah satu bank yang menerima jaminan tersebut yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan dalam hal pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Kedudukan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu SKGR pada prinsipnya dapat dijadikan jaminan untuk suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menjadikan SKGR sebagai jaminan dalam perikatan yang terjadi diantara para pihak yaitu tidak ada larangan SKGR untuk dijadikan jaminan, karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara setiap pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur apa yang mereka perperjanjikan, ketentuan ini sejalan dengan pengaturan mengenai hak perorangan yang bersifat relatif. Sehingga apabila dalam suatu perjanjian disepakati bahwa SKGR akan dijadikan jaminan, maka SKGR sah sebagai jaminan dalam perikatan yang disepakati oleh para pihak. (2) Penyelesaian Terhadap Kredit yang Bermasalah dengan menggunakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Jaminan dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu Dengan penjaminan SKGR yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan, meletakkan kreditur pada kedudukan yang tidak aman, yaitu tidak memiliki hak untuk didahului sebagaimana kreditur pemegang Hak Tanggungan dan sulit dalam pelaksanaan eksekusinya dalam hal debitur *wanprestasi*. Eksekusi terhadap jaminan tanah yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan adalah dengan cara *rieele executie* yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyatakan bahwa tergugat *wanprestasi*.

*Kata Kunci: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Agunan, Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES)*

**POSITION OF CERTIFICATE OF INDEMNITY AS COLLATERAL IN THE  
PROVISION OF RURAL GENERAL CREDIT AT PT. INDONESIAN PEOPLE'S  
BANK (PERSERO) TBK UKUI UNIT, PELALAWAN REGENCY**

(Dicky Kurniawan, NIM. 1820123050, Master of Notary, Post-Graduate Program,  
Faculty of Law Andalas University, vi + 95 Pages, 2022)

**ABSTRACT**

In general, the Collateral used in a lending activity is movable goods such as cars or immovable objects such as land, each of which is proven by a Certificate of Ownership for land and Proof of Ownership of Motorized Vehicles for two-wheeled or four-wheeled vehicles. However, in practice BRI also receives a Certificate of Compensation in the process of granting kuperdes credit. Where the SKGR is issued by the Village Head and known by the Camat. The position of the Certificate of Compensation on the results of the transfer of rights by buying and selling between residents if it is guaranteed to the Bank cannot be tied to the Mortgage Rights if it has not been certified. However, there are some banks that still accept debtors with land certificates of compensation as collateral for granting credit. One of the banks that received the guarantee, namely PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ukui Unit Pelalawan Regency in terms of granting Rural General Credit. The research method used in this research is Sociological Juridical, which is an approach taken to analyze the extent to which a legal regulation is effective. The results of this study are (1) the position of the Certificate of Compensation as Collateral in the Provision of Rural General Credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Pelalawan Regency, namely SKGR in principle can be used as collateral for an engagement as long as the parties agree to make SKGR as collateral in the engagement that occurs between the parties, namely there is no prohibition on SKGR to be used as collateral, because according to Article 1338 In the Civil Code, each party to the agreement is given the freedom to regulate what they have agreed on, this provision is in line with the regulation of relative individual rights. So if in an agreement it is agreed that SKGR will be used as collateral, then the SKGR is valid as collateral in the engagement agreed by the parties. (2) Settlement of Non-performing Loans by using a Certificate of Compensation as Collateral in the granting of Rural General Credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ukui Unit Pelalawan Regency, namely with SKGR guarantees that are not tied to Mortgage Rights, placing creditors in an unsafe position, namely not having the right to be preceded as creditors holding Mortgage Rights and difficult execution in the event that the debtor defaults. The execution of land guarantees that are not bound by Mortgage Rights is by rielele executie, namely filing a civil lawsuit to state that the defendant is in default.

*Keywords: Certificate of Indemnity (SKGR), Collateral, Rural General Credit (KUPERDES)*